

ABSTRAK

Penguatan keamanan laut di Natuna ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional untuk mendukung pemenuhan target kontribusi ekonomi maritim. Bakamla melakukan berbagai proyek untuk melaksanakan penguatan keamanan laut sebagai peran aktif dalam ekonomi maritim, meningkatkan kebutuhan untuk pengadaan barang/jasa yang harus terhindar dari risiko fraud dan kasus korupsi agar tepat guna. Data menunjukkan tingginya kasus korupsi PBJ secara nasional dan tingginya risiko fraud PBJ melalui hasil SPI Bakamla. Kondisi ini rentan menimbulkan fraud dari tahap perencanaan hingga serah terima barang/jasa. Dukungan APIP diperlukan sebagai mitra untuk memberikan assurance dan consulting dalam rangka early warning system dalam rangka mitigasi risiko fraud pengadaan barang/jasa. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan melalui probity audit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan Inspektorat Bakamla untuk implementasi probity audit. Dari hasil analisis kesiapan, didokumentasikan tantangan dan strategi implementasi probity audit dalam rangka mitigasi risiko fraud pengadaan barang/jasa di Bakamla. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan memanfaatkan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Bakamla belum siap secara struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya untuk mengimplementasikan probity audit. Selain itu, tantangan utama implementasi probity audit yaitu independensi Inspektorat dan budaya organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya kompetensi dan jumlah SDM serta lemahnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Oleh karena itu, strategi atau rekomendasi yang disarankan adalah mengajukan perubahan kedudukan Inspektorat dalam rangka memperkuat kewenangan, meningkatkan pemahaman para pimpinan mengenai probity audit, menyiapkan probity audit sebagai PKPT, meningkatkan jumlah dan kompetensi auditor, dan membangun sistem informasi khusus pengawasan.

Kata Kunci: *Fraud, Pengadaan Barang/Jasa, Kesiapan, Probity Audit*

ABSTRACT

Strengthening marine security in Natuna is a national priority to support maritime economy's contribution target. Bakamla conducts various projects to strengthen marine security as an active role in the maritime economy, increasing the need for public procurement, which must avoid fraud and corruption risks to be effective. Data shows high number of public procurement corruption cases nationally and high public procurement fraud risks through Bakamla's SPI results. This vulnerability begins from planning stage to the handover of goods / services. APIP's support is needed as a partner to provide assurance and consulting as an early warning system to mitigate fraud risks in the public procurement. This can be realized through probity audits. This study examines the Bakamla's Inspectorate readiness for probity audit implementation. Readiness analysis results used to examine the challenges and strategies for implementing probity audit in order to mitigate the risk of fraud in the public procurement in Bakamla. The research was conducted using qualitative method and case study approach. Results showed that Bakamla's Inspectorate is not ready in terms of organizational structure, organizational culture, and resources. In addition, main challenges of probity audit implementation are Inspectorate's Independence and organizational culture, budget constraints, lack of competence and number of human resources, and weak technology use in supervision. Therefore, suggested strategy is to propose change for Inspectorate's position in order to strengthen its authority, improve leaders' understanding of probity audit, prepare probity audit as PKPT, increase the number and competence of auditors, and build special information system for supervision.

Keywords: Fraud, Public Procurement, Readiness, Probity Audit